

PERAN SEKRETARIS GAMPONG DALAM MENATA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI GAMPONG DAYAH LEUBUE KECAMATAN ULIM

ZULIADEN JAYUS¹

¹Ilmu Administrasi Negara, Universitas Jabal Ghafur, Sigli

e-mail:¹zuliadenjayus@unigha.ac.id

ABSTRACT

Suksesnya Pembangunan disuatu Gampong tidak terlepas dari peranan komunikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Gampong dan perangkat Gampong lainnya serta peran masyarakat itu sendiri, dan masyarakat dapat memahami tentang tujuan pembangunan melalui informasi-informasi yang diterima tersebut. Jadi Sekretaris Gampong sebagai penata administrator perlu memprakarsai tentang proses pelaksanaan pembangunan tersebut sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang antara lain adalah sebagai berikut: Sejauhmana peran Sekretaris Gampong dalam menata administrasi pemerintahan di Gampong Dayah Leubue Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie jaya, Hambatan apa saja yang ditemui Sekretaris Gampong dalam penataan administrasi tersebut, Upaya apa saja yang dilakukan oleh Sekretaris Gampong untuk menanggulangi hambatan tersebut Tujuan dari pelaksanaan penelitian dapat ditetapkan sebagai berikut: Untuk mengetahui sejauhmana Peran Sekretaris Gampong dalam Menata Administrasi Pemerintahan di Gampong Dayah Leubue Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie jaya, Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab Sekretaris Gampong belum sepenuhnya berperan dalam menata administrasi pemerintahan tersebut, Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk menaggulangi berbagai hambatan dimaksud, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam melakukan penelitian data yang kongkrit serta keterangan yang akurat demi untuk bahan penyusunan skripsi sangat diperlukan, oleh karena itu penulis menggunakan metode deskriptif dengan hasil pembahasan bahwa data yang mana bahwa selama ini pelayan administrasi kepada masyarakat yang telah berjalan tidak didukung oleh peralatan yang tersebut diatas untuk dipergunakan sebagai mana mestinya. Dengan demikian pelayanan yang diberikan pemerintahan gampong terhadap masyarakat masih jauh dari yang diharapkan dan baru sebatas asal berjalan apa adanya.

Kata kunci : Pembangunan, Administrasi Pemerintahan, Administrasi Gampong
Peran Sekretaris

1. Pendahuluan

Untuk menyeragamkan Gampong diseluruh Propinsi Aceh yang bercorak Nasional dan mengadakan tertib hukum serta menciptakan kepastian hukum terhadap jalannya organisasi pemerintahan terendah tersebut. Didalam pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa

Pemerintah Gampong terdiri dari Keuchik dan Badan Permusyawaratan Gampong yang disebut juga dengan Tuha Peut atau nama lain.

Suksesnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan hingga dapat menyentuh kesemua tingkat dan kepentingan masyarakat yang universal, tidak terlepas dari peran serta pemerintah gampong dalam hal ini Sekretaris

Gampong yang menyelenggarakan semua kegiatan administrasi di tingkat Gampong. Banyak faktor lain yang ikut mempengaruhinya seperti kemampuan melaksanakan manajemen didalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang menyeluruh, serta dalam melaksanakan berbagai hal yang berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan pembangunan tersebut terutama yang menyangkut dengan perencanaan, pengawasan dan teknik pelaksanaan serta sistem komunikasi dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dimana pembangunan itu dilaksanakan.

Oleh karenanya peran sekretaris Gampong dalam menata administrasi pemerintahan Gampong akan sangat menentukan keberhasilan di segala sektor pembangunan Gampong, tidak terlepas dari didukung penuh oleh masyarakat, maka secara nyata dalam proses pembangunan sangat besar kemungkinan pembangunan yang dimaksud tidak berjalan secara lancar dan tidak tercapai target sebagaimana yang diharapkan.

Bila hal tersebut terjadi akan memberikan dampak negatif terhadap proses pertumbuhan dan dinamika pembangunan yang dilaksanakan di gampong. Jadi dalam upaya mamajukan pemerintahan dan pembangunan Gampong, orang yang sangat berperan adalah Pemerintah Gampong itu sendiri yaitu Keuchik, Sekretaris Gampong berserta dengan segenap masyarakatnya,

Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong semuanya bersumber dari Pemerintah tingkat atas baik dari Pemerintah Mukim, Pemerintah Kecamatan, Kabupaten bahkan dari Pemerintah Pusat. Dalam rangka pelaksanaan urusan rumah tangga Gampong terdapat dua dimensi administrasi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintahan Gampong yaitu pelaksanaan administrasi dalam arti luas untuk mencapai tujuan dan keinginan masyarakat

dalam rangka melaksanakan pembangunan fisik dan mental, dan pelaksana administrasi perkantoran yang merupakan tugas Sekretaris Gampong untuk memberikan pelayanan public

Menampung aspirasi masyarakat merupakan tugas Pemerintah Gampong yaitu Keuchik dan Sekretaris Gampong yang harus diterima dan memusyawarahkan dengan para Tuha Peut. Dalam menyusun suatu rencana sebelum ditetapkan menjadi keputusan Gampong maka haruslah dimusyawarahkan terlebih dahulu agar rencana tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Secara umum prinsip pelayanan administrasi kepada masyarakat adalah cepat, tepat, prosedur, memudahkan dan jangan mempersulit, karena keberadaan atau adanya pemimpin bersama perangkatnya adalah untuk melayani dan memperlancar roda Pemerintahan Gampong serta pelayanan publik yang optimal. Dalam pelayanan pembangunan baik pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan dan sosial budaya maupun dalam bidang lainnya perlu adanya komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait bahkan dengan masyarakat dimana pembangunan tersebut dilaksanakan. Peranan media massa dewasa ini sangat membantu masyarakat dalam menerima berbagai informasi baik mengenai pembangunan maupun informasi lainnya yang berkenaan dengan pelayanan masyarakat. Dengan adanya media massa ini masyarakat lebih mengerti dan memahami bagaimana semestinya pelayanan yang harus diterima dan diberikan oleh pemerintah. Melalui media massa komunikasi akan terjalin antara pemerintah dan masyarakat.

Adanya komunikasi ini dapat menjangkau masyarakat luas, karena peranan media massa dalam berkomunikasi akan mempercepat langkah pembangunan nasional letak peranannya adalah dalam hal membantu mempercepat proses peralihan masyarakat yang

tradisional menjadi masyarakat modern. Sebagai agen pembangunan, media massa sangat berperan dan berpengaruh sekaligus banyak dapat dilihat, dirasakan, didengar oleh masyarakat. Ia berperan sangat aktif dalam hal membantu proses modernisasi dalam segala aspek kehidupan bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas jelaslah bahwa banyak hal yang menyebabkan sekelompok masyarakat sukar menerima perubahan. Oleh karena itu disinilah letak peranan seorang pemimpin yang harus dilaksanakan melalui media massa dalam hal ini Sekretaris Gampong juga selaku komunikator pembangunan Gampong jadi lengkaplah peranan seorang Sekretaris Gampong dalam menghadapi hambatan terhadap proses perubahan dalam suatu masyarakat,

Seorang Sekretaris Gampong sebagai pembantu Keuchik dalam perpanjangan tangan Pemerintah yang berada ditingkat atas, menggunakan berbagai teknik atau metode agar masyarakat dapat mengerti dan memahami arti pentingnya pelaksanaan pembangunan, apabila hal ini dapat dilakukan dengan sempurna, maka pelaksanaan pembangunan yang diarahkan ke Gampong akan membawa hasil yang memuaskan.

Sistem informasi dan komunikasi yang tepat dan terarah serta terpadu perlu sekali dilakukan dalam upaya pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat pula dilakukan karena adakalanya keinginan dan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah sering kali terjadi benturan, sehingga banyak masalah-masalah yang perlu segera diselesaikan

Tujuan pembangunan adalah menciptakan swadaya dimana masyarakat Gampong menjadi subjek dan bukan objek pembangunan. Namun kesenjangan dan tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan masih tetap terjadi. Salah satu penyebabnya adalah masalah peranan Pemerintah Gampong dalam memberikan informasi pembangunan, yang sebenarnya

harus diterima oleh masyarakat dimana pembangunan tersebut dilaksanakan. Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, dimana ada pembangunan, kegiatan manusia disitu pula terjadi komunikasi sebagai tindak lanjut dari pada interaksi. Oleh karena dalam kehidupan manusia dimanapun mereka berada terlebih pelaksanaan pembangunan, komunikasi diibaratkan sebagai penyeberangan dalam mencapai kepentingan.

Suksesnya Pembangunan disuatu Gampong tidak terlepas dari peranan komunikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Gampong dan perangkat Gampong lainnya serta peran masyarakat itu sendiri, dan masyarakat dapat memahami tentang tujuan pembangunan melalui informasi-informasi yang diterima tersebut. Jadi Sekretaris Gampong sebagai penata administrator perlu memprakarsai tentang proses pelaksanaan pembangunan tersebut sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam usaha meningkatkan swadaya masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah gampong sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Meskipun Pemerintah Gampong berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan swadaya masyarakat tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri terhadap pembangunan, usaha tersebut tidak akan berjalan begitu pula sebalikannya, walaupun pemerintah gampong tidak berusaha apa-apa untuk meningkatkan swadaya masyarakat, tetapi bila partisipasi masyarakat besar, maka swadaya masyarakat akan tinggi.

Usaha meningkatkan partisipasi masyarakat yang akan menimbulkan swadaya bagi pembangunan fisik maupun non fisik di gampong. Dengan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai unsur yang ada dalam masyarakat, terutama pemimpin informal, diharapkan

dapat menimbulkan swadaya masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa Gampong Dayah Leubue sangat potensial terhadap pelaksanaan pembangunan dibidang pertanian. Dimana Pemerintah Gampong bersama-sama dengan petugas terkait turun langsung ke gampong untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang program pengembangan pertanian karena hasilnya akan dapat menambah pendapatan masyarakat. Demikian juga pembangunan di bidang-bidang lainnya

Demikian pula dalam bidang keagamaan masyarakat sangat aktif melaksanakan kegiatan keagamaan seperti pengajian bagi anak-anak dan remaja, pengajian kaum ibu dan bapak seperti wirid yasin, dalail Khairat dan bidang keagamaan lainnya yang sifatnya meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Subhanahuwa Ta'ala. Masalah pendidikan merupakan masalah nasional yang sangat menentukan untuk kemajuan bangsa dan negara, karena jika pendidikan suatu negara lebih maju dan berkembang, maka apapun yang dilaksanakan untuk kemajuan bangsa termasuk dalam bidang pembangunan akan mudah dapat terwujudkan. dihindari.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam melakukan penelitian data yang kongkrit serta keterangan yang akurat demi untuk bahan penyusunan skripsi sangat diperlukan, oleh karena itu penulis menggunakan metode deskriptif, sebagaimana yang ditulis oleh Winarno Surachmat (2013 :29), :
"Menuturkan dan menafsirkan data yang ada misalnya tentang situasi yang dialami suatu hubungan, kegiatan pandangan yang nampak atau tentang suatu proses yang sedang berlangsung, kelainan yang sedang muncul, kecendrungan yang nampak, pertentangan yang runcing dan sebagainya".

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Gambaran Umum Gampong Dayah Leubue Kecamatan Ulim

Gampong Dayah Leubue merupakan salah satu Gampong dalam Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie denngan luas wilayah lebuuh kurang 100 Ha yang meliputi :

- Tanah Sawah
50 Ha
- Tambak
5 Ha
- Rawa-Eawa
7 Ha
- Perumahan
38 Ha

Gampong Dayah Leubue Kecamatan Ulim di batasi dengan batas-batas sebagai berikut ::

- Sebelah Utara berbatas denngann Gamponng Mesjid Ulim Baroh
- Sebelah selatan dengann Dengan Gampong Keude Ulim dan Gampong Meunasah Krueng
- Sebelah Timur dengan Gampong Tanjong Ulim/Gampong Grong-Grong Capa
- Sebelah Barat dengan Gampong Pulo Lhok/Gampong Mesjid Ulim Baroh

Perkembangan pembangunan Gampong secara keseluruhan telah mengalami pergeseran kearah yang lebih baik ditandaio dengan pasca Bencana alam Gempa dan Tsunami tahun 2004 serta perjanjian kesepakatan damai antara Pemerintah republic Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka menunjukkan peningkatan yang signifikan, sudah mulai adanya bantuan dari pemerintah maupun swasta yang masuk ke Gampong Dayah Leubue yang dapat dirasakan oleh masyarakat, secara umum kondisi sumber daya manusia dan infrastruktur sudah mulai membaik

Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang Peranan Sekretaris Gampong dalam menata administrasi Pemerintahan Gampong di Gampong Dayah leubue Kecamatan Ulim kabupaten Pidie Jaya, terlebih dahulu akan di sajikan struktur organisasi Gampong Dayah Leubue

berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yaitu :

- Keuchik (A.Muthaleb),
- Sekretaris Gampong (Muhammad),
- Imum Gampong (Tgk.Abd Manaf Ahmad),
- Tuha Peut (Zulkifli M.Amin),
 - Saifullah S.Ag
 - M. Jakfar Usman
 - Syarian
 - Basri Sabi
 - Ibrahim Ben
 - Bustami S.Pd
- Kaur pemerintahan (Husni),
- Kaur Umum (Nurdin),
- Kaur pembangunan Amirullah Usman),
- Kadus Panglima Muda (Zakaria Hasan),
- Kadus Hakim Sulaiman (Saidi Ibrahim),
- Tuha Lapan :
- Ketua (Fadli Yusuf)
- Yusliadi (Sekretaris
- Tgk Sayrkawi (Ketua Bidang Agama)
- M.Ali (Ketua bidang pembangunan)
- Bukhari (Ketua Bidang keamanan)
- Zakaria Sabi (Anggota)
- Firdaus Kamaruddin (Bendahara)

Peranan Sekretaris Gampong Dalam Menata Administrasi Pemerintahan Gampong di Gampong Dayah Leubue Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya

Berkenaan dengan penataan administrasi yang dilakukan oleh pemerintahan gampong dalam hal ini Sekretaris Gampong khususnya dalam bidang administrasi seperti administrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi keuangan dan lain-lain. Dalam penataan administrasi kepada masyarakat gampong yang menyangkut dengan administrasi umum dikerjakan oleh Sekretaris Gampong Dayah Leubue. Pelayanan administrasi umum menyangkut dengan pembuatan surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar.

Inventaris merupakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sebuah gampong baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Adapun inventaris yang dimiliki oleh Gampong Dayah Leubue antara lain dapat dilihat dalam tabel dibawah ini yaitu:

TABEL. 1
KEADAAN BARANG INVENTARIS
GAMPONG DAYAH LEUBUE

No	Nama Barang	Jumlah	Ket.
1	2	3	4
1	Kursi Kayu	10 buah	-
2	Kursi Plastik	50 buah	-
3.	Lemari	2 buah	-
4.	Mesin Ketik	1 buah	-
5	Mesin Pompa Air	1 buah	-
6,	Kipas Angin	1 buah	-
	Jumlah	65	-

Sumber Data: Gampong Dayah Leubue,
Keterangan : Diolah Kembali

Keputusan gampong merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh sebuah gampong, dalam hal ini Keuchik selaku pimpinan gampong berhak untuk mengatur segala sesuatu yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat tidak pernah dibuat dalam keputusan gampong secara tertulis namun Keuchik belum membuat secara tertulis. Sedangkan keputusan gampong dilakukan untuk kepentingan penyaluran uang pembangunan gampong yang berasal dari pemerintahan atasan dibuat oleh Kepala Urusan atau Kepala seksi pembangunan gampong pada pemerintahan Tingkat Kecamatan atas persetujuan pemerintahan gampong. Maksud tersebut adalah untuk memperlancar penyaluran dana pembangunan yang ada di gampong.

Sesuai dengan kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan penataan administrasi pada Biokrasi pemerintahan gampong kurang berjalan sebagai mana mestinya karena diperoleh keterangan bahwa keputusan gampong tidak dilakukan secara tertulis oleh pemerintah gampong

Keberadaan buku agenda tersebut disebabkan Karena Sekretaris Gampong selalu mengeluarkan surat yang berhubungan dengan berbagai kepentingan masyarakat seperti memberikan surat keterangan dan lain-lain. Dalam penataan administrasi kependudukan yang perlu dilaksanakan antara lain pembuatan buku induk penduduk, buku penduduk sementara, buku perubahan penduduk, buku perkembangan penduduk, buku kartu keluarga, buku tanda penduduk dan buku jumlah penduduk. Buku induk penduduk adalah buku yang memuat identitas penduduk yang dikerjakan oleh pemerintahan gampong dalam rangka pelayanan administrasi penduduk.

Buku penduduk sementara adalah yang isinya mengenai keterangan tentang penduduk yang bersifat sementara ataupun pendataan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi gampong yang menyangkut dengan unsur-unsur administrasi penduduk. Untuk kegiatan tersebut ternyata pemerintahan gampong tidak melaksanakan pengisian buku penduduk sementara.

Menurut data yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa buku perkembangan penduduk tidak dikerjakan dalam sistem administrasi pada gampong yang diambil sampel tersebut. Pengisian buku kartu keluarga adalah menjadi tanggung jawab pemerintahan gampong dalam menyelenggarakan tugasnya yang berkenaan dengan pelayanan administrasi penduduk. Dalam kenyataannya menurut data yang diperoleh menyatakan bahwa pemerintahan gampong yang ditetapkan sebagai sampel telah mengisi buku kartu keluarga.

Buku kartu tanda penduduk yang berisikan identitas dari pada kartu penduduk seluruh masyarakat dalam gampong yang harus diisi pula secara lengkap oleh pemerintahan gampong. Namun berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa pemerintahan gampong tidak membuat atau mengisi buku jumlah penduduk menurut kriteria tersebut. Selanjutnya akan dikemukakan jumlah penduduk Gampong Dayah Leubue Kecamatan Ulim yang disajikan dalam tabel berikut:

TAEL. 2 Jumlah Peduduk Gampog Dayah Leubue Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Ket.
1	2	3	4
1	Laki-Laki	350	-
2	Perempuan	362	-
	Jumlah	712	-

Sumber Data: Gampong Dayah Leubue,

Keterangan : Diolah Kembali

Berikut ini akan penulis sajikan tentang mata pencaharian penduduk Gampong Dayah Leubue yang terdiri dari beberapa sektor, masing-masing akan penulis kemukakan dalam tabel berikut :

TABEL. 3 Mata Pencarian Masyarakat Gampong Dayah Leubue

No	Pekerjaan	Jumlah	Ket.
1	2	3	4
1	Petani	126 orang	-
2	Buruh	53 orang	-
3	Pegawai Negeri	20 orang	-
4	Nelayan	49 orang	-
5	Pedagang	29 orang	-
6	TNI/Polri	- orang	-
7	Tukang Batu	3 orang	-
8	Tukang Kayu	5 orang	-
9	Penjahit	6 orang	-
10	Bengkel	1 orang	-

Sumber Data: Gampong Dayah Leubue,

Keterangan : Diolah Kembali

Untuk Fasilitas gedung pendidikan, sampai saat ini di Gampong Dayah Leubue tersedia sarana pendidikan dasar,

sedangkan untuk melanjutkan pendidikan harus ke gampong lain yang berjarak tempuh 200 M. Umumnya masyarakat Gampong Dayah Leubue, rata-rata telah menyelesaikan pendidikan sampai dengan Sekolah Lanjutan Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan usia wajib belajar yang ada di Gampong yaitu 100 orang dan yang tidak sekolah 2 orang atau 0,2 %

Dalam berbagai kegiatan atau program yang akan diimplementasikan di lapangan pasti menghadapi berbagai kendala, demikian juga di sisi lain terdapat unsur-unsur atau komponen yang dapat dijadikan landasan dan mendukung berjalannya sebuah kegiatan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintahan di Gampong Dayah Leubue terdapat berbagai kendala. Secara garis besar baik pendukung maupun penghambat bersumber dari internal dan eksternal.

1. Faktor internal dimaksudkan adalah kendala yang bersumber dari aparatur pemerintahan gampong itu sendiri termasuk katagori yang kemampuan personal baik dari kapasitas keilmuan maupun kecakapan dalam menjalankan tugas kurang memadai.
2. Faktor eksternal adalah berbagai fasilitas baik sarana maupun prasarana pendukung kegiatan serta kondisi dan situasi dimana program diimplementasikan.

Sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil suatu penelitian mengenai Sistem manajemen pemerintahan Gampong di Gampong Dayah Leubue ditemui beberapa faktor yang menjadi hambatan atau kendala-kendala sehingga pelaksanaan manajemen tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun hambatan-hambatan dimaksudkan yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kemampuan perangkat pemerintahan gampong dalam menata administrasi dan manajemen sehingga pelayanan terhadap masyarakat belum

dapat terlaksana sebagaimana mestinya,

2. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintahan gampong masih sangat terbatas sehingga apabila masyarakat ingin berkomunikasi, hendak membuat sebuah surat harus datang kerumah Keuchik atau Sekdes dimana mereka berada baru ia mengemukakan kepentingannya.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat dipahami bahwa telah terjadi akumulasi kendala baik dari personality aparatur maupun fasilitas. Walaupun demikian kegiatan pelayanan administrasi tetap berjalan walaupun tidak begitu maksimal, hal ini dikarenakan faktor dari pemerintah yang belum pro aktif memberikan fasilitas. Pemberdayaan staf dalam manajemen modern meliputi pembinaan sumberdaya dapat difungsikan secara maksimal, simultan, terkoordinir dan sistematis untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karenanya kekurangan baik kemampuan maupun fasilitas hendaknya dijadikan sebagai tantangan untuk mengapai tujuan. Langkah arif ini hanya dapat dibaca dan disikapi oleh pemimpin yang mempunyai visi, misi dan strategis serta kemampuan manajemen yang handal lagi profesional.

3.2 Pembahasan

Analisis Peranan Sekretaris Gampong Dalam Menata Administrasi Pemerintahan Gampong di Gampong Dayah Leubue Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya

Keputusan keuchik gampong merupakan pedoman atau aturan dalam rangka pelaksanaan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi pemerintahan gampong dan masyarakat gampong. Oleh karena itu keputusan Keuchik gampong harus dicatat dalam buku keputusan Gampong sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berhubung keputusan keuchik tidak pernah dibukukan atau dibuat maka pembukuan kedalam buku keputusan Gampong tidak dilakukan. Berbagai aset atau kekayaan milik pemerintah dan masyarakat gampong baik benda bergerak maupun tidak bergerak seperti sawah, tanah kebun, meja, kursi, lemari dan lain-lain harus dicatat dalam buku inventaris gampong

Tugas tersebut adalah menjadi tanggung jawab pemerintahan gampong namun tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan sehingga data inventaris gampong tidak dapat diakses secara cepat, selama ini dilakukan dengan sistem tradisional. Ketidak sistematisnya dalam administrasi aset ini berimplikasi pada terhambatnya informasi dan akses kepada semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Pelaksanaan tugas Sekretaris berkenaan dengan pemberian pelayanan surat menyurat baik kepada pemerintah atasannya maupun kepada masyarakat memerlukan agenda sebagai tempat pencatatan identitas surat.

Teridentifikasi sirkulasi surat-surat akan mudah mendeteksi jalur dan frekwensi persuratan. Buku Ekspedisi merupakan sebuah buku untuk mencatat surat-surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Gampong, dari isian buku ini dapat diketahui alur dan perjalanan surat yang namun demikian dalam prakteknya dilapangan masyarakat belum menjadi

suatu budaya untuk tertib administrasi terutama agenda ekspedisi surat.

Dari sisi ini dapat terindikasi bahwa pemerintahan gampong tidak atau belum menjalankan tertib administrasi persuratan dengan memanfaatkan buku ekspedisi. Berdasarkan peraturan perangkat pemerintah gampong harus di inventarisir dalam buku perangkat pemerintahan gampong maksud tersebut adalah supaya adanya data yang objektif tentang identitas perangkat pemerintahan gampong. Sehingga memudahkan pemberian informasi data tentang identitas pemerintah gampong tersebut.

Keadaan tanah dalam wilayah gampong menurut jenis penggunaan seperti sawah, perkebunan, perkarangan (ladang), telaga, empang perumahan, perkantoran, pertokoan, tempat rekreasi dan menurut status kepemilikannya seperti tanah milik perorangan, milik badan hukum, milik negara dan luasnya perlu diinventarisir dan dicatat dalam buku inventarisir gampong.

Dengan adanya tertib dalam pencatatan tentang status pemilikan, jenis penggunaan dan luasnya menjadi faktor pendukung yang sangat urgen dalam proses administrasi pertanahan ditingkat gampong. Disamping itu juga sangat mendukung keberadaan statistik gampong yang menyangkut dengan masalah pertanahan, sehubungan dengan tidak berjalannya program pendataan pertanahan dan hal yang berkaitan dengannya maka keadaan tanah di gampong secara administrasi tidak dapat diketahui secara akurat dan tepat.

Secara administratif seluruh penduduk gampong harus tercatat dan terdata dengan lengkap dalam buku induk penduduk secara mendetil dalam setiap gampong sehingga dapat diketahui dengan jelas. Selanjutnya dapat memudahkan informasi pada semua pihak dan dapat dijadikan salah satu pijakan untuk menentukan kebijakan dalam pembangunan. Mengingat buku tersebut tidak terisi dengan baik dan benar maka

informasi keadaan penduduk gampong kurang terdeteksi.

Kondisi ini jelas bahwa pembangunan yang dijalankan atau dilaksanakan tidak mengacu pada kondisi riil dan tidak berpihak pada data. Demikian kondisi penduduk sementara tidak terdata dengan tertib, hal ini mengindikasikan ketertiban gampong masih perlu penanganan yang serius oleh pihak pemerintahan. Pada hal kita dapat melihat yang bahwa administrasi ataupun manajemen tersebut merupakan salah satu jalan dalam membangun gampong demi kemajuan, tentang keluar dan masuknya penduduk dapat mengantisipasi dalam hal-hal yang tidak diinginkan karena ulah pendatang yang tidak jelas.

Pengidentifikasian jumlah kepala keluarga digampong, anggota dan identitas masing-masing anggota keluarga dalam gampong, pemerintah gampong berkewajiban untuk melakukan mencatat dalam buku keluarga. Dengan adanya pencatatan identitas anggota dalam setiap keluarga dapat memudahkan pelayanan administrasi kepada masyarakat yang menyangkut tentang kependudukan.

Pencatatan penduduk dalam buku keluarga sejauh ini tidak dilakukan oleh pemerintahan gampong dan penyajian informasi kepada masyarakat tidak dapat diberikan secara sistematis administratif dengan demikian selama ini data dipublikasikan bersifat praduga. Pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada masyarakat perlu dilengkapi dengan kartu tanda penduduk berisikan identitas dari para penduduk yang lebih berhak memegang kartu tanda penduduk. Kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa pemerintahan gampong telah mengisi buku tersebut, dengan demikian akan mempermudah akses data penduduk dewasa ini, pemegang kartu tanda penduduk dengan berbagai identitasnya.

Dalam konteks ini pemerintahan Gampong Dayah Leue Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya telah menjalankan

tugasnya dengan baik disamping itu pula perlu suatu pembenahan terhadap kesempurnaan dalam mempermudah bagi sipembuat identitas diri dari kepala desa atau gampong dimana ia berada. Pencatatan Buku Kartu Keluarga, ternyata pemerintahan gampong juga melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah dapat memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan sangat baik.

Keadaan jumlah penduduk menurut jenis kelamin, agama, latar belakang pendidikan harus dicatat oleh pemerintahan gampong dalam buku jumlah penduduk. Oleh karena itu jumlah penduduk secara kasar telah diisi namun tidak terperinci seperti latar belakang pendidikan, pekerjaan, usia itu semua tidak dicatat oleh gampong.

Penataan keuangan oleh pemerintah gampong yang menyangkut dengan penerimaan dan pengeluaran baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan yang harus dibukukan dalam Buku Anggaran Gampong. Karena pengelolaan keuangan gampong adalah merupakan penentuan terhadap penyelenggaraan pemerintahan digampong. Kebutuhan keuangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong harus dilaksanakan atau dianggarkan setiap awal tahun anggaran dan penggunaannya harus berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran.

Dalam realitas di lapangan dapat terlihat dimana pemerintahan gampong tidak melaksanakan sebagaimana mestinya dan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku namun demikian pihak pemerintahan gampong sudah berupaya serta dalam proses keuangan gampong yang ada seperti pengelolaan keuangan bantuan gampong dicatat dalam buku catatan harian selama pelaksanaan pembangunan berdasarkan daftar isian proyek. Oleh karena itu pelayanan administrasi keuangan gampong tidak dilaksanakan secara maksimal oleh pejabat pemerintahan gampong.

Untuk melaksanakan pelayanan administrasi oleh pemerintahan gampong secara sempurna harus didukung oleh kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai seperti adanya kantor keuchik atau kepala gampong serta berbagai kelengkapan peralatan (mobiler), meja, kursi, lemari dan alat tulis menulis dikantor tersebut agar dapat lancarnya terhadap tujuan yang diinginkan oleh masyarakat gampong.

Menurut penelitian secara riil di lapangan diperoleh data yang mana bahwa selama ini pelayanan administrasi kepada masyarakat yang telah berjalan tidak didukung oleh peralatan yang tersebut diatas untuk dipergunakan sebagai mana mestinya. Dengan demikian pelayanan yang diberikan pemerintahan gampong terhadap masyarakat masih jauh dari yang diharapkan dan baru sebatas asal berjalan apa adanya.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan kepada pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian ini dan setelah melakukan pembahasan serta analisis pada bab-bab terdahulu maka dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran antara lain adalah sebagai berikut:

1. Peranan Sekretaris Gampong dalam menata administrasi Pemerintahan Gampong di Gampong Dayah Leubue Kecamatan Ulim belum terlaksana secara maksimal dikarenakan ditemui berbagai faktor penghambat dalam penataannya, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum mencapai sasaran sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak,
2. Hambatan-Hambatan yang ditemui antara lain rendahnya pendidikan perangkat gampong dan ketrampilan yang dimiliki juga belum memadai, terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah gampong sehingga pelayanan yang diberikan belum maksimal,

3. Adapun upaya dalam menanggulangnya adalah seharusnya dalam pemilihan perangkat gampong perlu diperhatikan latar belakang pendidikan, minimal tamatan SMA sederajat agar pelayanan yang diberikan pada masyarakat berjalan. Jadi sarana dan prasarana seperti mesin ketik, komputer perlu diadakan oleh pemerintah gampong guna memudahkan pelayanan terhadap masyarakat yang ada di gampong

Saran-Saran

1. Disarankan supaya pemerintah atasan dalam pemilihan perangkat gampong lebih memperhatikan latar belakang pendidikan karena faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
2. Disarankan hendaknya disetiap gampong dapat memfungsikan Kantor Keuchik supaya penataan administrasi kepada masyarakat dapat terlaksana secara kontinue dan terorganisir serta sistematis.
3. Disarankan agar sarana dan prasarana yang belum lengkap agar dapat dilengkapi sehingga pelayanan administrasi terhadap masyarakat dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh civitas akademik yang telah memberikan kesempatan dan juga memberikan dorongan kepada peneliti sehingga dapat terselesaikannya sebuah karya ilmiah yang dapat memberikan kontribusi kepada Universitas Jabal Ghafur dan khususnya kepada Khasana Jurusan Ilmu Administrasi dan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, dan juga penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada informan dan yang telah meluangkan waktu memberikan informasi yang menjadi data dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Gie, The Liang. 2009. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta : Liberty.
- Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2009, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Siagian, P. Sondang. 2008. Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinambela, Litjan Poltak, dan kawan-kawan . 2011.Reformasi Pelayanan Publik: Teori,Kebijakan dan Implementasi.Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sumber Lain :
- Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007
Tentang Persyaratan Dan Tata CaraPengangkatan SEKDES Menjadi Pegawai Negri Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005.
- Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-undang No.30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan.